

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2003**

(Studi Kasus Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

**IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURIZATION POLICY IN
LOCAL GOVERNMENT BASED ON PP NO. 8 TAHUN 2003
(Case Study Provincial Government of Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**Fendiek Dwi Putra A.
2000 052 0040**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005**

**IMPLEMENTASI KEBERESTRUKTURISASI
ORGANISASI PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2003**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)

S
Disusun Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Dia Oleh:

**Fendwi Putra A.
2052 0040**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

**Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Pada :

Hari/Tanggal : Senin 3 Oktober 2005

Tempat : Ruang Sidang Fisipol

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua

Drs. Sucanto, M. Pol

Penguji I

Penguji II

Bambang Eka CW. SIP. M.Si

Drs. Ujung Priadi, M.Si

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)**

Tanggal : 3 Oktober 2005



Drs. Suswanta M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi dimanapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila ada di kemudian hari terbukti terdapat duplikat dan ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka saya akan bertanggungjawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yang membuat pernyataan

Fendiek Dwi Putra A.

*Perubahan hanyalah tinggal waktu, cepat atau lambat
itu pasti akan terjadi
(Gie)*

*Tujuan bukanlah yang utama, tetapi yang utama adalah proses
pencapaian tujuan itu.
(Iwan Fals)*

*Kemerdakaan itu bukan suatu pertaruhan tetapi suatu
tanggungjawab, jika mengela dari tanggung jawab itu
berarti kalah dalam pertaruhan.
(Andre Colin)*

*Hari ini adalah hakikat penampilan mimpi-mimpi hari kemarin dan
mimpi-mimpi hari ini adalah perwujudan hari esok, sedangkan
kewajiban kita lebih banyak dari pada waktu yang tersedia
(Hasan Al Banna)*

MOTTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

✠ *Ayahanda dan Ibunda tercinta yang
telah memberikan yang terbaik
untukku*

✠ *Kakak beserta istri*

✠ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2003 (Studi Kasus Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak. Bambang Eka CW. S.IP. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Penguji I.
2. Bapak Suranto, SIP. M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan yang padat untuk memberikan bimbingan demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ulung Pribadi, M.Si, selaku Dosen Penguji
4. Bapak Drs. Suswanta M.Si, Selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan
5. Bapak Ir.Bambang Susanto Priyohadi, MPA, selaku Sekretaris Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Seluruh staf dan karyawan Sekertaris Daerah Propinsi DIY yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi.
7. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmunya, semoga kelak ilmu yang saya peroleh dapat berguna bagi masa depan saya
8. Rencang-rencang sedoyo (Teguh, nuwun catetane, mboten wonten sampeyan ra isoh ujian)
9. Seseorang yang tak bisa aku sebutkan disini tapi yang pasti kau selalu ada di hati ini
10. Konco-konco Kos sing bagus dewe sak omahe, aku ra bakal lali-rupo lan rupamu (Joko, Watono, Bany, Doel, Sarjono, Warsum, Mardiah, kawit) Cah-cah eks Khasanah.
11. Bu Sumadi Sekeluarga, Bu matur nuwun sanget panjenengan sampun nulung kanti angsal utang amargi kiriman arto telat.
12. Sesuatu yang selama ini memberi warna dalam kehidupanku di Jogja Mitra Regent, SK dan lain-lain.
13. Keluarga besar Ahmad Khaidar Syifa' Bayanillah matur nuwun
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
SINOPSIS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Dasar Teori	10
1. Implementasi Kebijakan	10
2. Desentralisasi Otonomi	13
3. Organisasi	17
4. Restrukturisasi Organisasi	19
5. Pemerintah Daerah	22
E. Definisi Konsepsional	36
F. Definisi Operasional	37
G. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	37
2. Obyek Penelitian	37
3. Metode Pengumpulan Data	37
4. Teknik Analisis Data	38

BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Propinsi DIY.....	40
1. Kondisi Geografis	40
2. Bidang Pemerintahan	35
B. Profil Pemerintah Propinsi DIY	44
1. Sejarah Propinsi DIY	48
2. Lambang DIY	50
3. Visi, Misi.....	52
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Propinsi DIY	56
A. Sekretariat Daerah	56
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	63
2. Dinas Pertanian	64
3. Dinas Perikanan dan Kelautan	66
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	67
5. Dinas Pendidikan	69
6. Dinas Kebudayaan	70
7. Dinas Sosial.....	72
8. Dinas Kesehatan.....	73
9. Badan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75
10. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah	76
11. Dinas Perhubungan	78
12. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	79
13. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum	81
14. Badan Perencanaan Daerah	83
15. Badan Pengawas Daerah	84
16. Badan Pendidikan dan Pelatihan	85
17. Badan Perpustakaan Daerah.....	86
18. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	87
19. Badan Informasi Daerah	88
20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	89

21. Badan Pariwisata Daerah	90
22. Kantor Perwakilan	91
23. Kantor Arsip Daerah	92
24. Kantor Pembedayaan Perempuan	92
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI	
ORGANISASI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA	
YOGYAKARTA BERDASARKAN PP NO. 8 TAHUN 2003	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan	93
1. Isi Kebijakan	93
2. Konteks Kebijakan	108
B. Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Organisasi	115
1. Aspek Struktural	115
2. Aspek Sumber Daya Manusia	126
3. Aspek Sumber Dana	140
4. Aspek Sumber Daya yang Lain.....	142
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	
Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman	144
1. Faktor Pendukung	144
2. Faktor Penghambat	145
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 11	Peerbedaan Pokok Pemerintahan	4
Tabel 2.1	Luas, Wilayah, Ketinggian dan Jarak Lurus Ke Ibukota Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Propinsi DI. Yogyakarta Tahun 2003	40
Tabel 2.2	Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi DI. Yogyakarta Tahun 2003	41
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Propinsi DI Yogyakarta Tahun 2003	43
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota/Desa dan Kabupaten/Kota di Propinsi DIY Tahun 2002-2003	44
Tabel 2.5.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi DI. Yogyakarta Tahun 2004	45
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Propinsi DI Yogyakarta Tahun 1990-2000	45

SINOPSIS

Reformasi administrasi publik di tingkat nasional dan daerah berimplikasi pada terjadinya perubahan peran, beban tugas, fungsi serta struktur organisasi yang mewadahnya. Penyesuaian kelembagaan merupakan salah satu substansi yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, oleh sebab itu sebagai lembaga publik di tingkat lokal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dihadapkan pada keinginan untuk melakukan reorientasi dan reorganisasi sistem manajemen Pemerintahan Daerah yang dapat mendorong proses pelebagaan dan pemberdayaan organisasi.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul tentang **“Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Studi Kasus Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?. Untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan secara obyektif perumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode penelitian diskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulai tahun 2004 telah dibentuk struktur organisasi Pemerintah Propinsi DIY yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 12 Dinas, 8 Badan, 3 Kantor, sebagaimana hal ini telah tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1,2 dan 3 Tahun 2004 Propinsi DIY. Secara garis besar untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan penataan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan PP Nomor 8 Tahun 2003. Restrukturisasi organisasi Pemerintah DIY berdasarkan kepada Konteks kebijakan yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi, serta karakteristik organisasi dan kepemimpinan, didukung ketaatan dan ketanggapan para aparat pelaksana. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala seperti keterbatasan dana, sarana dan prasarana, serta manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan belum optimal, khususnya dalam penataan personil daerah.

Agar implementasi kebijakan restrukturisasi dapat berjalan secara optimal maka perlu didukung dengan adanya sumber dana serta sarana dan prasarana yang cukup dengan jalan menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah serta pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.